

# IMPLEMENTASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PADA MASA COVID-19 DI KABUPATEN BATANG HARI

SALSA GHAZANI PUTRI  
NPP. 29.0370

*Asdaf Provinsi Jambi  
Program Studi Keuangan Publik*

Email :  
[salsaghazaniputri@gmail.com](mailto:salsaghazaniputri@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** (Contains the background behind the research). The outbreak of Corona Virus disease 19 (Covid-19) has had a huge impact on the Indonesian economy. As a result of the refocusing and reallocation of budgets from the center, many regional developments have been hampered, causing people's purchasing power to decline, and also the cancellation of several activity programs in the Batang Hari Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This financial policy needs to be carried out by every regional government, including the Batang Hari Regency Government in changing the APBD to support regional economic recovery **Purpose** : to observe as a whole includes the implementation of the APBD changes in the Efforts to Accelerate Regional Economic Recovery during the Covid-19 Period in Batang Hari Regency, the obstacles in its implementation as well as the efforts made by the Batang Hari Regency Government. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation **Result** : the implementation of the APBD Amendment in an effort to accelerate regional economic recovery during the Covid-19 period in Batang Hari Regency has gone quite well because of the Budget Manager, the Reallocation Schedule starting from disbursement to reporting, Provisions on procedures for Budgeting Utilization and Reporting and the number of employees participating in training , have certification and their placement is known. **Conclusion:** The implementation of the Regional Budget Change in an effort to accelerate regional economic recovery during the Covid-19 period in Batang Hari Regency has gone quite well because of the Budget Manager. There are several obstacles such as difficulty in adjusting Regional Expenditures, Delays in Development Programs/activities that Cause Reduction of Regional Revenues and Regional Apparatuses using the budget in carrying out programs and activities, efforts have been made such as coordinating with Regional Apparatus Organizations (OPD) related to regional budget adjustments, increase MSEs through the OPD Diskoperindag to increase regional income and carry out infrastructure development that can absorb labor from the people, and hold a meeting with the head of the OPD regarding budget rationalization.

**Keywords:** *Implementation, Regional Economic Recovery, Changes Of APBD*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Wabah *Corona Virus disease 19 (Covid-19)* sangat memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Akibat dari *Refocusing* dan Realokasi anggaran dari pusat, banyak pembangunan daerah yang terhambat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, dan juga pembatalan beberapa program kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari. Kebijakan keuangan ini perlu dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam perubahan APBD guna menunjang pemulihan ekonomi daerah. **Tujuan** untuk mengamati secara keseluruhan meliputi pelaksanaan implementasi perubahan APBD dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah pada Masa *Covid-19* di Kabupaten Batang Hari, Kendala dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** pelaksanaan Perubahan APBD dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah pada masa *Covid-19* di Kabupaten Batang Hari telah berjalan cukup baik karena Pengelola Anggaran, Jadwal Realokasi dimulai dari pencairan sampai ke pelaporan, Ketentuan tentang tata cara Penganggaran Pemanfaatan dan Pelaporan serta jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, memiliki sertifikasi serta penempatannya sudah diketahui. **Kesimpulan:** pelaksanaan Perubahan APBD dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah pada masa *Covid-19* di Kabupaten Batang Hari telah berjalan cukup baik karena Pengelola Anggaran. Ada beberapa hambatan seperti Kesulitan dalam penyesuaian Belanja Daerah, Terhambatnya Program/kegiatan Pembangunan yang Menyebabkan Berkurangnya pendapatan Daerah dan Perangkat Daerah telah menggunakan anggaran dalam menjalankan program dan kegiatan, dilakukan upaya seperti melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penyesuaian anggaran belanja daerah, meningkatkan UMKM melalui OPD Diskoperindag untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang dapat menyerap tenaga kerja dari rakyat, dan mengadakan rapat bersama kepala OPD mengenai rasionalisasi anggaran.

**Kata kunci:** Implementasi, Pemulihan Ekonomi Daerah, Perubahan APBD

1956

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sangat besar dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak kepada kondisi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial rakyat Indonesia. Menurunnya berbagai aktivitas ini mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Pemerintah merespon dampak *Covid-19* ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi *Covid-19*. Ditinjau secara keseluruhan, Peraturan tersebut mengatur Kebijakan Keuangan Negara dan kebijakan stabilitas sistem Keuangan Negara. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan di bidang perpajakan, Kebijakan Belanja Negara termasuk kebijakan di Bidang Keuangan Daerah, dan kebijakan pembiayaan.

Mewujudkan *good governance*, Pemerintah Pusat memberikan hak kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bantuan berdasarkan asas otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa pandemi *Covid-19* pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerah secara maksimal, sedangkan di masa masa *corona virus* ini berdasarkan Surat Edaran tentang *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dengan percepatan penanganan *Covid-19* masing masing daerah dengan secara maksimal agar dapat mengurangi serta mempercepat penanganan pandemi yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia serta dapat membantu perekonomian rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak terjadi krisis ekonomi di setiap daerah.

Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, Akibat dari *Refocusing* dan Realokasi anggaran dari pusat, maka banyak pembangunan daerah yang terhambat sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun, dan juga menyebabkan pembatalan beberapa program kegiatan pada APBD Kabupaten Batang Hari kecuali yang bersumber dari Dana Alokasi khusus Kesehatan dan Dana Alokasi Khusus pendidikan. Upaya Percepatan pemulihan Ekonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi mengambil langkah langkah melalui APBD dengan menyusun Program dan Kegiatan Yang ada di APBD.

Pendapatan Daerah pada tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat sebanyak Rp. 84.560.838.082,97 lalu pada saat *Covid-19* mulai masuk pada tahun 2020 pada APBD perubahan menurun menjadi Rp. 1.261.733.322.252,05 dan meningkat kembali ditahun 2021. Belanja dan

pembiayaan daerah juga mengalami turun naik seperti pendapatan daerah. Hal ini menandakan *Covid-19* membawa dampak pada besaran anggaran APBD yang terjadi di Kabupaten Batang Hari. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Kabupaten Batang Hari memiliki tanggungjawab besar untuk mengelola anggaran tersebut agar dapat terealokasi dengan baik terutama untuk penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis kemudian memfokuskan penelitian pada Perubahan APBD kabupaten Batang Hari dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah di masa pandemi *Covid-19* dalam rangka Skripsi dengan mengambil judul: **“IMPLEMENTASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PADA MASA COVID-19 DI KABUPATEN BATANG HARI”**.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Wabah *Corona Virus disease 19 (Covid-19)* sangat memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Akibat dari *Refocusing* dan Realokasi anggaran dari pusat, banyak pembangunan daerah yang terhambat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, dan juga pembatalan beberapa program kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari. Kebijakan keuangan ini perlu dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam perubahan APBD guna menunjang pemulihan ekonomi daerah

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, **Jamila Lestyowati & Abdila Faza Kautsarina**, berjudul **“Implementasi Realokasi Anggaran dan *Refocussing* Kegiatan di Masa Pandemi *Covid-19*: Studi Kasus BDK Yogyakarta”**. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Realokasi kegiatan dan *refocusing* anggaran di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta dilakukan sesuai dengan pedoman terkait. Proses revisi berjalan massif pada unit teknis internal BDK khususnya bidang pelaksanaan selaku *person in charge* (PIC) kegiatan pelatihan. Koordinasi dilakukan dengan pusat diklat pemilik program pelatihan melalui PJJ untuk kegiatan pelatihan mana yang akan dilakukan dan yang tidak

Kedua, **Natta Sanjaya**, berjudul “**Kebijakan Penganggaran Daerah di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten** ”. menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Provinsi Banten khususnya Pemda telah mengusahakan penganggaran keuangan daerah selama *Covid-19* sesuai dengan pengaturan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan *refocusing* dan realokasi anggaran supaya terfokus ke Bidang Kesehatan, Pemulihan Sektor Ekonomi, dan Jaringan Pengamanan Sosial.

Ketiga, **Yulia Puspitasari Gobe**, berjudul “**Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam dan Ndeas Model** ”. menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Platform yang ditawarkan melalui standarisasi pendidikan dan pelatihan teknis dalam negeri dapat menciptakan kekuatan dari dalam negeri yang selanjutnya menciptakan kondisi untuk pembentukan infrastruktur publik dan swasta dalam negeri dan sistem transportasi untuk mobilitas barang dan tenaga kerja di dalam negeri dan internasional (impor & ekspor) dari negara mana pun. Serta memperkuat perkembangan pasar domestik sehingga menciptakan lebih banyak peluang bisnis di tingkat domestik dan tetangga. Selanjutnya melakukan kerja sama di sektor swasta dan publik di negara yang sama. Suasana terbuka seperti itu yang diciptakan di tetangga memberikan peluang dan kondisi yang sama bagi semua produsen kecil dan menengah lokal dan produsen tetangga dalam semua aspek perdagangan, investasi, dan pariwisata. Ini dimanifestasikan dalam desain. semua produsen kecil dan menengah lokal dilakukan secara efisien yang pada akhirnya kerjasama antara dua negara berujuk pada penjagaan lingkungan hidup agar dapat memberikan rasa kenyamanan diantara dua negara.

#### 1.4 **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokus Penulis.

## 1.5 Tujuan

Berdasarkan Rumusan masalah, Maka penulis menentukan Beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui Implementasi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Masa *Covid-19* Di Kabupaten Batang Hari.
2. Untuk mengidentifikasi Faktor penghambat Implementasi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Masa *Covid-19* Di Kabupaten Batang Hari.
3. Untuk memahami Upaya pemerintah kabupaten Batang Hari dalam Implementasi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Masa *Covid-19* Di Kabupaten Batang Hari.

## II. METODE

Sugiyono (2016: 232) dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian bahwa “metode penelitian kualitatif pemerintahan, data didapat dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus dan dimantapkan dengan triangulasi.” . Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Implementasi Perubahan APBD dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Masa *Covid-19* Di Kabupaten Batang Hari

Implementasi merupakan salah satu materi pokok dalam kajian Hukum Dan Perundangundangan sebagai indikator mengukur sejauh mana hukum dapat berlaku. Implementasi Perubahan APBD Dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Masa *Covid-19* Di Kabupaten Batang Hari berjalan dengan program kegiatan yang bertujuan untuk banyak menyerap tenaga kerja dan yang dapat memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Pembangunan infrastruktur jalan yang dapat memberikan lapangan kerja untuk rakyat dan meningkatkan usaha usaha kecil rakyat, seperti penyediaan materil dari pasir, kerikil, tanah

begitupun dengan infrastruktur gedung yang banyak menyerap tenaga kerja yang dapat menghidupkan sektor ekonomi lain, toko bangunan dan pengusaha batu bata, bantuan langsung sembako di Diskoperindag juga bantuan modal usaha kecil.

A. ***Selection Of Special Task Force To Implement The Budget Procedure/ Pemilihan Gugus Tugas untuk Melaksanakan Prosedur Anggaran ( Penentuan Pengelola Anggaran Covid- 19)***

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Lebih lanjut dalam pengelolaan anggaran tersebut tentunya ada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Bapak Tesar Arlin, SE, ME menjelaskan bahwa dalam perubahan APBD ada pihak yang terlibat yaitu tim Anggaran Pemerintah Daerah. anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2021 ada sebanyak 26 Anggota yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, Wakil oleh Kepala Bapeda dan Sekretaris oleh

Kepala Bakeuda. Berdasarkan hasil wawancara dan Gambar diatas dapat ditarik kesimpulan Bahwa pelaksanaan Perubahan APBD memiliki suatu tim khusus yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tim ini yang memiliki tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah yang dalam hal ini berkaitan dengan Perubahan APBD dalam upaya percepatan Pemulihan ekonomi daerah pada masa *Covid-19*. Selain TAPD ada Badan Anggaran DPRD yang memiliki fungsi Memeberikan Saran dan Pendapat Berupa Pokok Pikiran DPRD Kepada Kepala Daerah dalam Mempersiapkan Rancangan APBD Sebelum Peraturan Kepala Daerah Tentang Rancangan Pemerintah Daerah ditetapkan.

B. ***Development Of Budget Time Table/ Pengembangan Tabel Waktu Anggaran ( Tersedianya Jadwal Realokasi Anggaran, Pencairan Sampai ke Pelaporan)***

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak dapat berjalan apabila dalam pelaksanaannya tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Pedoman keuangan merupakan komponen terpenting dalam terlaksananya perubahan APBD agar pemerintah Kabupaten Batang Hari dapat menentukan upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah pada masa *Covid-19*. Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Keuangan, Daerah telah dilakukan koordinasi dengan komponen terpenting dalam Pemerintah Daerah agar membentuk suatu acuan khusus ataupun target dalam Implementasi

perubahan APBD dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah pada masa *Covid-19* tersebut agar rasionalisasi anggaran berjalan dengan baik walaupun tidak luput dari suatu hambatan. terjadi perubahan anggaran yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dimana Jumlah pendapatan sebelum dilakukan perubahan yakni Rp. 1.314.008.350.675,00 menjadi Rp. 1.302.470.986.041,00. Berikutnya pada jumlah belanja terjadi perubahan dari sebelum perubahan sejumlah Rp. 1.322.658.350.675,00 setelah perubahan menjadi Rp. 1.311.245.780.334,32. Pembiayaan juga mengalami perubahan dimana sebelumnya sejumlah Rp. 18.150.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp. 13.274.794.293,32.

C. ***Preparation Of Budget Manual/ Persiapan Manual Anggaran ( Tersedianya Ketentuan Tentang Tata Cara Penganggaran, Pemanfaatan, Pencairan Anggaran Sampai ke Pelaporan)***

Penyesuaian anggaran dalam rangka Perubahan APBD tidak begitu saja berjalan melainkan harus adanya pedoman yang akan terjadi dengan dijalankannya kebijakan. Petunjuk teknis merupakan bentuk antisipasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah agar dapat melihat suatu kemungkinan yang dapat terjadi dalam implementasi perubahan APBD dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah pada masa *Covid-19*.

Penanganan *Covid-19* anggarannya diambil dari belanja tidak terduga. Proses dari BTT ini sendiri adalah OPD mengajukan permohonan kepada Bupati lalu diadakan rapat TAPD kemudian dikeluarkan keputusan rapat TAPD selanjutnya rapat tersebut menghasilkan jumlah anggaran yang diberitahukan kepada OPD terkait dan dilakukan pembaharuan izin pengeluaran BTT, lalu diajukan surat Keputusan Bupati untuk izin mengeluarkan BTT. Lalu diproseslah SPP SPM, terbit SP2D sesuai hasil rapat TAPD. SP2D Belanja Tidak Terduga langsung ditujukan ke OPD penerima, melalui rekening Bendahara Pengeluaran OPD. Dikeluarkannya SP2D sebagai syarat pencairan anggaran menjadi tahap terakhir agar anggaran tersebut dapat dibelanjakan untuk kepentingan penanganan *Covid-19*. Pemkab Batang Hari menyiapkan dana sebesar Rp. 7.179.000.000 untuk belanja tidak terduga dari APBD 2021.

Sekretaris badan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari bapak Akmaludin SH, CRP, CGAE menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dari OPD terkait penggunaan BTT adalah perangkat daerah menyusun RKB sebagai dasar usulan penggunaan BTT, RKB disampaikan kepada PPKD selaku BUD setelah melalui pemeriksaan inspektorat, Kepala perangkat daerah juga



secara bersamaan menyampaikan laporan kepada bupati tentang pembebanan BTT dengan tembusan kepada kepala Bakeuda.

D. ***Development Of Follow-Up Training Indicating Stages Of The Budget Cycle/ Pengembangan Pelatihan Tindak Lanjut yang Menunjukkan Tahapan Siklus ( Jumlah Pengelola Keuangan yang Sudah Pernah Mengikuti Pelatihan Keuangan, Jumlah Pengelola Keuangan yang Sudah Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan dan Penempatan Staf yang Sudah Bersertifikasi atau Sudah Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan)***

Sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dengan skill. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan handal merupakan aset yang penting dalam organisasi agar dapat tumbuh dan berkembang, yang mana meliputi usaha dalam menyukseskan kebijakan realokasi anggaran tahun 2021, Pengembangan sumber daya dan hal-hal lain dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Sekretaris Badan Keuangan Daerah bapak Akmaludin, SH, CRP, CGCAE mengatakan bahwa banyak dari staf yang bertugas di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari ini mengalami sedikit hambatan dalam proses implementasi perubahan APBD dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah pada masa *Covid-19* di kabupaten Batang Hari. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh OPD yang anggarannya di realokasi kesulitan dalam penentuan prioritas penggunaan anggaran. Pak Akmaludin selaku Sekban Bakeuda bertugas mengumpulkan bahan untuk perumusan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan OPD dan melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung harus terus berkoordinasi dengan seluruh OPD agar pemulihan ekonomi daerah bisa cepat dicapai dalam masa *Covid-19*. Dalam pelaksanaan perubahan APBD kabupaten Batang Hari ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, menurut pak akmaludin sudah menjadi tugas Bakeuda dibidang anggaran untuk merencanakan dan menyusun APBD dimasa pandemi *Covid-19* ini, dengan staf staf Bakeuda dibawah subbidang keahlian masing masing, bakeuda telah melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk Staf yang telah mengikuti pelatihan perbendaharaan sebanyak Sembilan orang. Dan sudah memiliki sertifikat kompetensi keuangan.

Pegawai pegawai Bakeuda telah mengikuti pelatihan sesuai dengan subbidang keahlian masing masing. Walau tidak semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan bimtek yang ada. Bapak Akmaludin menyampaikan harapan untuk kedepannya jika ada Bimtek

selanjutnya akan dikirimkan pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi keuangan, dengan harapan seluruh pegawai Bakeuda menjadi pegawai yang berkompeten pada bidangnya. Jumlah pegawai yang ada di Bakeuda dinilai masih kurang. Pada tahun 2021 ini akibat dari perubahan APBD tadi pegawai tidak tetap (PTT) banyak yang diberhentikan karena APBD belum cukup kuat untuk membayar tenaga PTT. Pegawai Tidak Tetap (PTT) diseleksi ulang guna mencari pegawai yang berkompeten dibidangnya. Untuk Bakeuda sendiri, memang dicari PTT yang mampu dan paham dalam hal pengelolaan Keuangan. PTT yang lulus seleksi dari Bakeuda ada 37 orang. Berhasil melalui tahapan tes-tes yang telah diberikan oleh Bakeuda, 37 orang tersebut kemudian dipanggil untuk bekerja di kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari. Dalam Implementasi Perubahan APBD Dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Masa *Covid-19* Di Kabupaten Batang Hari masih belum maksimal, karena masih mengalami kendala dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran, sehingga perlunya memaksimalkan tingkat kedisiplinan pegawai dan koordinasi antar instansi atau OPD agar implementasi perubahan APBD tersebut dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Salah satu bagian utama yaitu sumber daya manusia diperlukan pengembangan dan pelatihan secara strukturan agar mampu melaksanakan pengelolaan anggaran sehingga penyesuaian anggaran dalam rangka implementasi perubahan APBD dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah pada masa

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Melda Oktaviana(2020) , berjudul “strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara melakukan evaluasi terhadap pemilihan sebelumnya terlebih dahulu kemudian menetapkan strategi dan membagi tugas ke unit unit yang ada kemudian menerapkannya kepada target (disabilitas) sehingga menambah partisipasi politik terfokus pada pemilih penyandang disabilitas, relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama membahas strategi KPU walaupun beda fokus, pada peneliti lebih fokus terhadap strategi untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pembahasan mengenai strategi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Andrian Marsella (2020), berjudul “Perempuan dan Kepemimpinan Politik” Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bagaimana urgensi yang mendesak sehingga diharuskan untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah meskipun ditengah kondisi

pandemic covid-19 karena ditakutkan terjadinya kekosongan kekuasaan pada suatu daerah, meskipun ada opsi pengganti jabatan sementara. Dalam penyelenggaraan pemilihan terdapat kekurangan yaitu kurangnya perangkat hukum yang mengatur sanksi yang diterima oleh pelanggar protokol kesehatan terkait covid-19.

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni pelaksanaan Perubahan APBD dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah pada masa *Covid-19* di Kabupaten Batang Hari telah berjalan cukup baik karena Pengelola Anggaran. Ada beberapa hambatan seperti Kesulitan dalam penyesuaian Belanja Daerah, Terhambatnya Program/kegiatan Pembangunan yang Menyebabkan Berkurangnya pendapatan Daerah dan Perangkat Daerah telah menggunakan anggaran dalam menjalankan program dan kegiatan, dilakukan upaya seperti melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penyesuaian anggaran belanja daerah, meningkatkan umkm melalui OPD Diskoperindag untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang dapat menyerap tenaga kerja dari rakyat, dan mengadakan rapat bersama kepala OPD mengenai rasionalisasi anggaran.

#### IV. KESIMPULAN

Pada umumnya kesimpulan merupakan suatu rangkuman singkat yang berisi pemahaman penulis terhadap penelitian yang dilakukan. Dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan uraian pokok, sebagai berikut :

1. Implementasi perubahan APBD dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah pada masa *Covid-19* di kabupaten Batang Hari sudah berlangsung efektif karena sudah memenuhi beberapa indikator dari Teori Implementasi Daka, yaitu :
  - a. Penentuan pengelola anggaran *Covid-19*
  - b. Tersedianya jadwal realokasi anggaran, pencairan sampai ke pelaporan
  - c. Tersedianya ketentuan tentang tata cara penganggaran, pemanfaatan, pencairan anggaran sampai ke pelaporan
  - d. Jumlah Pengelola keuangan yang sudah pernah mengikuti pelatihan keuangan
  - e. Jumlah pengelola keuangan yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi keuangan
  - f. Penempatan staf yang bersertifikasi atau sudah mengikuti bimtek pengelolaan keuangan

2. Hambatan dalam implementasi perubahan APBD dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah adalah :
  - a. Kesulitan Dalam Penyesuaian Belanja Daerah
  - b. Terhambatnya Program/Kegiatan Pembangunan Yang Menyebabkan Berkurangnya Pendapatan Daerah
  - c. Perangkat Daerah Telah Menggunakan Anggaran Dalam Menjalankan Program dan Kegiatan
3. Upaya dalam mengatasi Hambatan Implementasi Perubahan APBD dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah pada masa *Covid-19* adalah :
  - a. Melaksanakan Koordinasi Dengan OPD Terkait Penyesuaian Anggaran Belanja Daerah
  - b. Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Diskoperindag Unruk Meningkatkan Pendapatan Daerah
  - c. Mengadakan Rapat Bersama Kepala Perangkat Daerah Terkait Rasionalisasi Anggaran

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu sample lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Daka,dkk saja

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Dengan Implementasi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Masa *Covid-19* Di Kabupaten Batang Hari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Pemerintahan Di Kabupaten Batang Hari serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, dan Narbuko. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi aksara
- Nurdin, Ismael dan. Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Soisal* Surabaya: Media Sahabat cendikia
- Halim, Abdul dan M. Iqbal,2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN hal. 141
- Harsono, Hanifah, 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo jaya Hal. 67
- Noor, Juliansyah.2017. *Metodologi Penelitian skripsi, tesis, dosertasi,&karya ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Pearce, John A. dan Richard B. Robinson Jr. 2014. *Manajemen Strategis:Formulasi, implementasi, dan pengendalian* Jakarta: salemba Empat
- Samsu.2017. *Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, Kuantitatif, mixed methods, serta research & development*. Jambi:pusaka
- Sugiyono.2015. *Metode penelitian dan pengembangan pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

